

PELAKSANAAN PROGRAM PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) (STUDI DI SEKOLAH SMA NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Salsabila¹ Kartius Lesda²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

salsabila82@student.uir.ac.id kartius@soc.uir.ac.id

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Environmentally Caring and Cultured School Program (PBLHS) at SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci has implemented the PBLHS through three main components: school policies that support environmental preservation, implementation of an environment-based curriculum, and management of environmentally friendly facilities and infrastructure. Activities carried out include school greening, waste management based on the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle), utilization of a waste bank, and the cultivation of clean and healthy living behaviors within the school environment. However, several challenges remain, such as limited supporting facilities, low awareness among some school members, and the need for stronger synergy with related agencies and the surrounding community. In general, the implementation of the PBLHS at SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci has been going quite well and has had a positive impact on increasing environmental awareness among students and the entire school community.

Key Words : Implementation, Program, PBLHS, Adiwiyata

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci telah mengimplementasikan PBLHS melalui tiga komponen utama, yaitu kebijakan sekolah yang mendukung pelestarian lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, serta pengelolaan sarana dan prasarana ramah lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penghijauan lingkungan sekolah, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemanfaatan bank sampah, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung, rendahnya kesadaran sebagian warga sekolah, serta perlunya sinergi lebih erat dengan dinas terkait dan masyarakat sekitar. Secara umum, pelaksanaan PBLHS di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan siswa dan seluruh warga sekolah.

Key Words : Pelaksanaan, Program, PBLHS, Adiwiyata

Pendahuluan

Dalam lingkup satuan pendidikan, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau silabus mata pelajaran berfungsi mengarahkan satuan pendidikan dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten dan terukur. Sejalan

dengan pentingnya alur dan tujuan pembelajaran dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, program yang dijalankan oleh kementerian lingkungan hidup melalui Pendidikan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah menjadi wadah yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam kurikulum sekolah. Melalui program ini, siswa tidak hanya mempelajari teori tentang lingkungan, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi nyata menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

Sekolah merupakan suatu lembaga yang dirancang sebagai tempat manusia untuk memperoleh Pendidikan melalui para guru. Seiring dengan permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi disekitar kita, melalui pendidikan diharapkan mampu menanamkan kepedulian para generasi muda untuk menjaga lingkungan terutama para pelajar yang perlu mendapatkan edukasi tentang lingkungan, karena generasi muda adalah pewaris penghuni bumi di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 poin keempat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sikap peduli untuk menjaga lingkungan.

Sebagai salah satu upaya memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Gerakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan hidup dari warga sekolah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, antara lain diwujudkan melalui pemberian penghargaan bagi Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS, melalui penghargaan Adiwiyata.

Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Diharapkan siswa dapat memitigasi risiko kekurangan dari kerusakan lingkungan yang ada di wilayah sekitar sekolah.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini antara lain adalah siswa akan lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari tindakan mereka terhadap alam, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif, menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar, meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah. Melalui penerapan program PBLHS, sekolah dapat terlihat asri serta memanfaatkan sampah daun sekitar sebagai bahan baku pembuatan kompos.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2018), administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penekanan pada 'rasionalitas' di sini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang terukur dan logis dalam menjalankan tugas-tugas administrasi.

Setiap langkah dalam proses administrasi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional agar tujuan dapat tercapai dengan efektif.

Konsep Administrasi Publik

Menurut Widjaja (2015), kegiatan administrasi publik memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan politik pemerintah. Administrasi negara tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan keputusan-keputusan politik yang telah ditetapkan, tetapi juga berperan dalam mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan untuk proses penentuan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, administrasi negara sering kali terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan politik.

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi negara bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan bagian integral dari sistem pemerintahan yang berperan aktif dalam mendukung dan menentukan arah kebijakan politik yang berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, administrasi negara dan politik saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan negara.

Konsep Organisasi

Organisasi sebagai tools of management, sedangkan manajemen merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan pelbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Proses kegiatan tersebut terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemberian motivasi (motivating), pengawasan (controlling), dan penilaian (evaluating) (Siagian, 1971 : 76) dapat diterapkan dalam setiap unit administratif pada pelbagai tingkat pemerintahan.

Menurut Siagian (2015), organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dalam ikatan formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Siagian juga menekankan pentingnya hierarki dalam organisasi, di mana terdapat atasan dan bawahan. Definisi ini menyoroti struktur formal dalam organisasi yang melibatkan pembagian.

Konsep Manajemen

Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kepemimpinan dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota dan pengguna semua sumber organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Priansa, 2014:290).

Manajemen menurut Suwatno dan Doni (2014:16) manajemen Suwatno dan Doni merupakan ilmu dan seni dalam mengatur mengatur dan dar memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M): Man, Money, Methode, Material, Machine dan Market

Konsep Program

Arikunto (2014:9) bahwa suatu program adalah sebuah sistem, maka dapat dikatakan bahwa didalam program terdapat beragam komponen yang saling berkaitan dan bekerja yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen program ini adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah dari program. Selain

pembangun sebuah program, komponen ini merupakan faktor penentu keberhasilan program. Menurut Arikunto (2014:12), terdapat enam komponen utama yang menentukan keterlaksanaannya sebuah program, yaitu (1) siswa, (2) guru, (3) materi/kurikulum, (4) sarana dan prasarana, (5) manajemen atau pengelolaan dan (6) lingkungan.

Konsep Implementasi

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.

Konsep Pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)

a. Latar Belakang Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Menurut Panduan Adiwiyata (2012:13) Program Adiwiyata mempunyai pengertian suatu tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia dalam menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan dan berkelanjutan.

Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Program ini diharapkan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2013 Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Dapat diketahui bahwa sekolah adiwiyata harus melaksanakan komponen-komponen program adiwiyata yang memasukkan nilai budaya lingkungan untuk mewujudkan sekolah peduli dengan cara hidup Bersama lingkungan. Setiap komponen yang terkandung dalam sekolah adiwiyata menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan program adiwiyata. (Azmi & Elfyetti, 2017).

b. Pelaksanaan Program PBLHS

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata tersebut, maka di terapkan empat komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata: yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan

1. Kebijakan berwawasan lingkungan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman (2009: 134) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Program Adiwiyata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Untuk dapat mewujudkan sekolah Adiwiyata maka sekolah di tuntut untuk dapat mengembangkan kebijakan berwawasan lingkungan

2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan

Kurikulum berbasis lingkungan adalah kurikulum yang memuat tentang materi pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang disampaikan dengan beragam cara dalam upaya memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup. Menurut Suryobroto (2004:32) kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun diluar sekolah.

3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif

Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan dengan bentuk kerjasama yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pedoman Adiwiyata (2012:42) dijelaskan bahwa pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ditandai dengan menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler dalam pembelajaran persoalan lingkungan hidup bagi warga sekolah minimal 1 kegiatan secara rutin yang bertema lingkungan hidup pada setiap program ekstra kurikuler/kokurikuler dan terlaksananya kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yang diprakarsai oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar lebih dari 4 kegiatan per tahun

4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan

Eka (2011: 57) mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana Pendidikan adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melihat pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya.

Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab ini ialah hasil dan pembahasan yang berisikan mengenai pemaparan hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan Penelitian tentang Pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) (Studi di Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan). Berdasarkan Indikator Implementasi menurut Thomas B. Smith dalam Tachjan 2006 yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok sasaran, Organisasi Pelaksana dan Faktor lingkungan. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut :

1. Kebijakan yang diidealkan (Idealized Policy)

Menurut Thomas B. Smith dalam Tachjan 2006 Kebijakan yang diidealkan (idealised policy) yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.

a. Kurikulum Pembelajaran dan Visi Misi Sekolah

Pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) memerlukan kebijakan yang diidealkan termasuk kurikulum dan visi misi sekolah yang sangat diperlukan agar program tersebut berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi bagian dari budaya sekolah, bukan hanya kegiatan insidental.

Dapat disimpulkan bahwa visi dan misi sekolah menjadi arah utama yang memperkuat komitmen sekolah terhadap pelestarian lingkungan, dengan tujuan menciptakan lulusan yang berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Keterlibatan semua pihak, mulai dari guru, siswa, staf sekolah, hingga orang tua, menunjukkan bahwa Program Adiwiyata bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari budaya dan sistem pendidikan sekolah.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, bahwasanya kurikulum dan visi misi sekolah sebagai panutan dan berkaitan dalam Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) adalah salah satu bentuk implementasi nyata dalam membangun budaya peduli lingkungan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dan kehidupan sekolah sehari-hari.

b. Sumber Daya Anggaran

Agar Pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dapat berjalan dengan efektif diperlukan sumber daya yang memadai dan jelas. Adanya sumber daya yang memadai artinya semua unsur pendukung program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLHS) tersedia dan dikelola dengan baik. Mulai dari

orang yang mengelola, alat dan fasilitas, dana yang mencukupi, sampai dokumen dan aturan yang mengarahkan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dapat terlihat bahwa sumber daya anggaran untuk program Adiwiyata telah tersedia dan dialokasikan oleh pihak sekolah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penggunaan anggaran terlihat diarahkan untuk mendukung kegiatan seperti pengadaan sarana pendukung lingkungan (seperti tempat sampah terpilah, komposter, dan taman sekolah), pelaksanaan kegiatan edukatif, serta perawatan lingkungan. Namun demikian, keterbukaan informasi serta pelibatan warga sekolah, termasuk komite dan siswa, dalam perencanaan dan evaluasi anggaran masih perlu diperkuat. Dengan kurangnya partisipasi dan dukungan dari Dinas serta LSM setempat, pelaksanaan Program PBLHS masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal penguatan jejaring kemitraan dan dukungan sumber daya eksternal. Minimnya keterlibatan pihak luar menyebabkan sekolah harus mengandalkan sumber daya internal, baik dari dana BOS/BOSDA maupun swadaya warga sekolah. Hal ini berdampak pada terbatasnya inovasi program dan pelatihan yang bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih aktif dan terbuka agar keberlanjutan program dapat tercapai secara optimal.

2. Kelompok Sasaran (Target Group)

Menurut Thomas B. Smith dalam Tachjan 2006 Kelompok Sasaran (Target Group) yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.

a. Warga Sekolah

Warga sekolah merupakan kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), juga inti dari pelaksanaan keberhasilan Program karena merekalah yang secara langsung berperan dalam membangun, menjalankan, dan menjaga budaya lingkungan hidup yang berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh warga sekolah dan tanggapan dari berbagai responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa kelompok sasaran utama dalam program adalah seluruh warga sekolah, yang meliputi siswa, guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Selain itu, responden juga menyebutkan bahwa komite sekolah, orang tua, Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dipandang sebagai tanggung jawab bersama.

b. Instansi Dinas Lingkungan Hidup

Instansi-instansi Dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran penting dan sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan Program Peduli dan

Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Tanpa pembinaan, dukungan teknis, dan kebijakan dari dinas, sekolah akan kesulitan menjalankan program secara maksimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh responden, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) telah menunjukkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen sekolah, seperti siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan telah ditanamkan melalui kegiatan rutin seperti pemilahan sampah, kebersihan kelas, perawatan tanaman, serta melalui materi pelajaran yang memuat nilai-nilai lingkungan.

3. Organisasi Pelaksana (Implementing Organizing)

Organisasi Pelaksana (Implementing Organizing) merujuk pada struktur, kapasitas, dan mekanisme organisasi yang menjalankan kebijakan atau program, serta bagaimana organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan perencanaan yang ada. Menurut Thomas B. Smith dalam Tachjan 2006 implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan. SOP (Standard Operating Procedure) dalam Program PBLHS adalah pedoman baku atau prosedur tetap yang digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung penerapan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan secara konsisten, terstruktur, dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan Program Adiwiyata di sekolah telah menunjukkan perkembangan yang positif dan signifikan. Sekolah telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam berbagai aspek, seperti kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan tata kelola sekolah. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup pengelolaan sampah, hemat energi, dan pemeliharaan taman menjadi landasan yang kuat untuk menjalankan program secara terstruktur.

b. Pengawasan Kebijakan Program

Pengawasan dalam kebijakan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program oleh sekolah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan benar-benar diterapkan sesuai dengan pedoman Adiwiyata. Pengawasan penting untuk memastikan bahwa program bukan hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi budaya sekolah. Hasil

pengawasan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekolah dan memperkuat peran pendidikan dalam pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya peneliti melihat bahwa pelaksanaan program PBLHS di sekolah-sekolah secara umum telah mendapatkan bentuk pengawasan dari pihak internal sekolah, namun masih terdapat sejumlah tantangan dalam hal keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari dinas terkait. Mayoritas responden menyampaikan bahwa pihak sekolah telah menjalankan peran pengawasan terhadap pelaksanaan program, terutama melalui mekanisme internal seperti evaluasi berkala, pembentukan tim adiwiyata atau tim lingkungan sekolah, serta penyusunan laporan kegiatan secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam menjaga keberlangsungan program PBLHS sebagai bagian dari budaya sekolah.

4. Faktor Lingkungan (Environmental Factors)

Faktor Lingkungan yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

a. Aspek Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial budaya adalah gabungan antara pola hubungan sosial dan nilai-nilai budaya yang membentuk cara hidup suatu kelompok masyarakat. Itu berpengaruh besar terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam masyarakat atau institusi seperti sekolah.

Secara keseluruhan dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aspek sosial dan budaya terhadap pelaksanaan program PBLHS di sekolah masih bersifat terbatas dan belum merata. Secara umum, masyarakat belum sepenuhnya terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program PBLHS. Keterlibatan yang ada cenderung bersifat responsif (misalnya saat diundang atau diminta bantuan), bukan partisipatif yang muncul atas kesadaran bersama.

b. Aspek Ekonomi

Aspek lingkungan ekonomi dalam Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaannya. Ketersediaan dana, kemampuan mengelola sumber daya, dan dukungan ekonomi masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Dari hasil observasi dapat peneliti simpulkan bahwa secara keseluruhan, dukungan pemerintah daerah terhadap program lingkungan di sekolah masih terbatas pada aspek teknis dan edukatif, belum menyentuh aspek pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program lingkungan seperti Adiwiyata, diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan kebijakan yang juga mencakup dukungan material atau insentif bagi sekolah-sekolah berprestasi dan inovatif.

c. Aspek Politik

Lingkungan politik merujuk pada dukungan, komitmen, kebijakan, serta regulasi dari pemerintah atau pemangku kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan dan keberlanjutan program di sekolah. Lingkungan politik yang kondusif dapat mendorong terlaksananya Program Adiwiyata secara maksimal.

Dari hasil wawancara atau pengumpulan data yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, secara umum, hasil temuan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat dalam mendukung PBLHS melalui regulasi formal seperti Peraturan Bupati. Dukungan ini telah memberikan arah dan kejelasan peran kepada instansi terkait dalam membina sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pelaksanaan Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) (Studi di Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan) dapat disimpulkan bahwa program ini membawa pengaruh positif bagi warga sekolah karena mampu mendorong perubahan perilaku, membentuk karakter, serta menciptakan budaya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Namun pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan 4 indikator komponen kebijakan. Pertama, pada aspek kebijakan yang diidealkan, Program telah memiliki konsep yang jelas dan terarah, yakni mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan di lapangan karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan juga masih kurangnya kesadaran warga sekolah terutama siswa dalam memahami perilaku ramah lingkungan. Kedua, dari sisi kelompok sasaran, yaitu warga sekolah masih ditemukan rendahnya kesadaran, partisipasi, dan pemahaman terhadap nilai-nilai lingkungan. Program belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku dan budaya sekolah sehari-hari karena terdapat beberapa hambatan seperti terlalu banyaknya program yang dijalankan di sekolah sehingga menghambat kemajuan program ke tahap Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri. Ketiga, pada komponen organisasi pelaksana, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah, masih terdapat kendala dalam koordinasi lintas sektor, pengawasan, dan pemberian dukungan teknis maupun anggaran. Kurangnya keterlibatan aktif dari dinas terkait menyebabkan pelaksanaan program cenderung berjalan sendiri. Keempat, dari aspek lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, maupun ekonomi, belum sepenuhnya kondusif dalam mendukung keberhasilan program. Rendahnya keterlibatan masyarakat sekitar, minimnya dukungan dana, serta kurangnya kemitraan eksternal turut mempengaruhi keberlanjutan program.

Daftar Pustaka

Salsabila¹ dan Kartius Lesda²

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025

1285

Buku dan Jurnal :

- Ali, F. 2019. Teori Dan Konsep Administrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andry, H., & Tarmizi Yussa. (2020). Perilaku & Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Azwar, Saifudin. 2019. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Dr. H. Tachjan, M.Si (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung
- Gibson, J. L., John M. Ivancevich, & James H. Donnelly, Jr. 1984. Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses. Terjemahan Djoerban Wahid. Jakarta: CV. Teruna Grafika.
- Gibson, J. L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr., & Roberth Konopasche. 2003. Organization: Behavior, Structure, Process. New York : Mc Graw Hill, Inc.
- Kartiwa, A. (2012). Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Maksudi, B. I. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Smith, Thomas B. (2001). Policy Sciences. Amsterdam: Elsevier scientificPublishing Company.
- Andry, H., & Tarmizi Yussa. (2020). Perilaku & Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Kartiwa, A. (2012). Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurman, Al Sukri, & Suryani, L. (2023). Teori Administrasi. Yogyakarta: Deepublish.
- P.Robbins, S., & A.Judge, T. (2015). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- P.Siagian, S. (2000). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- P.Siagian, S. (2012). Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- P.Siagian, S. (2020). Teori Dan Praktek Pengambilan Keputusan. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung :Alfabeta
- Syafiie, I. K. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2017. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Syamsi, I, 2018. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Tangkilisan. (2003). Manajemen Publik. PT. Rineka Cipta.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung
- Widjaja, A. W. 2015. Administrasi Publik. Jakarta; Rajawali Press.
- Widodo, Joko. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Winardi, J. 2021. Manajemen Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manik, K. E. . (2018). Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Aini, M. H. (2014). Penguasaan konsep lingkungan dan sikap peduli lingkungan siswa sma adiwiyata mandiri di kabupaten mojokerto. *Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi (BioEdu)*, 3(3).
- Fridantara, A. S. (2015). Implementasi program adiwiyata di SMA Negeri 2 Klaten. *Hanata Widya*, 4(9).
- HASIBUAN, S. (2022). PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SISWA DI SMA SWASTA WIDIYA DHARMA PROVINSI SUMATRA UTARA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pahru, S., & Hitipeuw, I. (2021). Pelaksanaan Program Adiwiyata dalam Mendukung Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan (Doctoral dissertation, State University of Malang).
- Rokhmah, U. N. (2019). Pelaksanaan Program Adiwiyata Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 67-88.
- Wardani, D. N. K. (2020). Analisis implementasi program Adiwiyata dalam membangun karakter peduli lingkungan. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 60-73.
- Jusmita, S. N. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) TINGKAT SD DALAM MEWUJUDKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DI KABUPATEN GOWA (Doctoral dissertation, IPDN).
- SATRIA, M. B. P. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH (PBLHS)(STUDI DESKRIPTIF: SMP NEGERI 277 JAKARTA) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP*

- UNMA, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In

- Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk

- Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of

- Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori

Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".